

e-news letter

FEB V 2020

**PKSPARLEMEN**

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



KH. BUKHORI, Lc., M.A

# Pemerintah Harus Transparan Terkait Pasien Terduga Corona



# Kita Patut Waspada Terhadap Corona

Kita perlu mempersiapkan dampak terburuk, hingga pada akhirnya Covid - 19 tidak hanya telah membuat kita khawatir, namun juga telah berdampak sistematis ke sejumlah sendi kehidupan

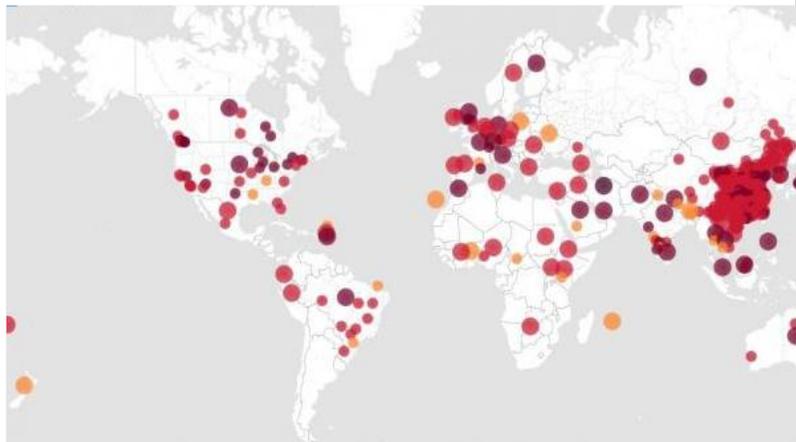
Kita patut bersyukur bahwa Indonesia hingga saat ini di dalam negeri belum ada terduga warga yang terkena corona virus (Covid-19), bukan tanpa alasan karena sejumlah negara tetangga Indonesia sudah positif dengan jumlah yang variatif. Per Jumat, 28 Februari 2020, COVID-19 sudah menewaskan 2.858 orang mayoritas di Cina daratan dan dikonfirmasi 83.079 kasus terinfeksi di sekitar 53 negara di dunia. Di antara 53 negara itu adalah Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Adapun

Indonesia ada beberapa yang suspek, namun hasil penelitian Balitbang Kementerian Kesehatan menyatakan tidak positif.

Kita patut mengingatkan, dalam berbagai kesempatan Pemerintah berulang kali menyatakan belum ada kasus Covid-19, meski dalam sejumlah temuan ada warga asing yang diketahui terinfeksi setelah berkunjung ke Indonesia. Terkini, Selandia Baru mengkonfirmasi kasus pertama virus corona.

Dilalahnya Pasien tersebut diketahui datang dari Iran dan terbang ke Auckland melalui Bali. Jika benar adanya pola ini bukan yang pertama, terlebih lonjakan korban di Iran tercatat menjadi yang paling besar diluar China.

Kita wajib mendukung sejumlah langkah yang telah Pemerintah lakukan, diantaranya mengembalikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wuhan dan sejumlah kapal pesiar. Apresiasi atas seluruh jejak baik tersebut, namun itu tidak boleh menanggalkan konsentrasi bahwa virus Covid-19 bisa terjadi kapan saja. Pemerintah



harus transparan dan menguatkan mitigasi dini (early warning detection), bukan untuk menambah ketakutan namun meningkatkan kewaspadaan. Bahwa ini tidak hanya perkara sederhana, urusan satu dua orang, dan sejumlah kecil institusi. Ajak bicara pihak-pihak yang bisa membantu, dan kirim pesan yang cukup kepada masyarakat.

Kita patut waspada, karena sempat tersiar kabar kematian pasien suspect virus corona (COVID-19) di RSUD dr. Kariadi Semarang pada Minggu (23/02/2020). Kala itu tindakan pemerintah yang terkesan menutup-nutupi kasus

tersebut dengan alasan rahasia hanya akan membuat publik semakin penasaran. Jangan buat publik resah dengan merahasiakan sesuatu yang perlu diketahui masyarakat. Pemerintah harus bertindak transparan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menaruh prasangka buruk kepada pemerintah dalam merespon ancaman virus corona ini.

Kita perlu mempersiapkan dampak terburuk, hingga pada akhirnya Covid - 19 tidak hanya telah membuat kita khawatir, namun juga telah berdampak sistematis ke sejumlah sendi kehidupan. Sebut saja yang terbaru, kebijakan Arab Saudi

yang secara resmi menutup akses perjalanan dari seluruh negara, membuat ribuan jamaah umrah terlunta-lunta. Kemudian, Covid-19 telah melungsurkan angka pergerakan pasar keuangan Indonesia. Tercatat, akhir pekan ini nilai tukar rupiah terkoreksi ke angka Rp 14.300 per dollar AS.

Kita harus transparan, Covid - 19 ini tentang Kita semua, bukan masalah sekedar oposisi dan eksekutif. Perlu kerjasama dan sama-sama kita cari solusi.

HUMAS FPKS DPR RI.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## **Pemerintah Harus Transparan terkait Kematian Pasien Terduga Virus Corona**

*Tindakan pemerintah yang terkesan menutup-nutupi kasus tersebut dengan alasan rahasia hanya akan membuat publik semakin penasaran. Jangan buat publik resah dengan merahasiakan sesuatu yang perlu diketahui masyarakat. Pemerintah harus bertindak transparan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menaruh prasangka buruk kepada pemerintah dalam merespon ancaman virus corona ini”*

**KH. Bukhori, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jawa Tengah I

# Kematian Pasien Terduga Virus Corona. Bukhori: Pemerintah Harus Transparan!

Jika benar pasien yang meninggal di Semarang tersebut positif karena virus corona maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah sigap dan antisipatif dalam merespon wabah ini agar tidak meluas,”

## **KH. BUKHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jawa Tengah I

Jakarta (27/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mendesak pemerintah agar berlaku secara transparan dalam menyikapi kabar kematian pasien suspect virus corona (COVID-19) di RSUP dr. Kariadi Semarang pada Minggu (23/2).

Politisi PKS yang berasal dari dapil I Jateng ini juga mengkritik tindakan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang enggan mengungkapkan penyebab pasien tersebut meninggal dengan alasan bersifat rahasia.

“Tindakan pemerintah yang terkesan menutup-nutupi kasus tersebut dengan alasan rahasia hanya akan membuat publik semakin penasaran. Jangan buat publik resah dengan merahasiakan sesuatu yang perlu diketahui

masyarakat. Pemerintah harus bertindak transparan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menaruh prasangka buruk kepada pemerintah dalam merespon ancaman virus corona ini” tegas Bukhori selepas rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kamis (27/2/2020).

Bukhori menambahkan, jika benar bahwa pasien tersebut meninggal diakibatkan oleh virus corona maka pemerintah harus sigap dan mengambil langkah antisipatif agar virus tersebut tidak meluas.

“Wabah corona memaksa pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan pelayanan umrah bagi warga di luar wilayahnya, termasuk Indonesia. Hal tersebut menjadi indikasi

bahwa mereka menganggap Indonesia sudah positif terkena wabah corona. Oleh karena itu, jika benar pasien yang meninggal di Semarang tersebut positif karena virus corona maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah sigap dan antisipatif dalam merespon wabah ini agar tidak meluas,” pungkask Bukhori.

Sebelumnya dikabarkan, RSUP dr. Kariadi Semarang melaporkan seorang pasien terduga virus corona (COVID-19) meninggal pada Minggu (23/2/2020). Namun pihak rumah sakit membantah bahwa pasien tersebut meninggal lantaran virus tersebut. Pasien tersebut sebelumnya ditempatkan di ruang isolasi khusus dan steril karena gejala yang dialami serupa dengan gejala virus corona.

Pernyataan rumah sakit yang membantah bahwa pasien meninggal lantaran virus corona juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy kendati tidak dijelaskan lebih lanjut perihal sebab kematian pasien tersebut dengan dalih kode etik.





# PKS Ingatkan Menag Dampak Virus Corona terhadap Umroh: Beliau Terlalu Tenang

Kami sudah mewanti-wanti Menteri Agama pada pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya, bagaimana kesiapan Kemenag kalau Corona ini terjadi. Dia bilang 'masih tenang, masih bisa diatasi'

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta -Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengatakan sudah mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal imbas penyebaran virus Corona terhadap penyetopan sementara jemaah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Dia mengingatkan Fachrul beberapa pekan lalu.

"Kami sudah mewanti-wanti Menteri Agama pada pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya, bagaimana kesiapan Kemenag kalau Corona ini terjadi. Dia bilang 'masih tenang, masih bisa diatasi'," kata Iskan di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Menurutnya, Fachrul terlalu santai dan tak awas

melihat adanya kemungkinan buruk dari isu penyebaran virus Corona. Padahal Iskan sudah memprediksi penyebaran virus Corona berdampak pada kunjungan jemaah umroh.

"Karena kami sudah melihat ini akan punya dampak terhadap umroh, umroh gitu kan bagian dari wisata, wisata itu yang kena dampaknya. Beliau terlalu tenang ya, tiba-tiba kaget kemarin," katanya.

Iskan juga meminta Fachrul tak mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat Indonesia menjadi waswas. Ia berharap supaya Fachrul tak asal omong dan memberi urus kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi untuk berdiplomasi.

"Apalagi Menteri Agama

saya minta supaya dia jangan memberikan statement-statement yang berlebihan. Kenapa? Ini sudah urusan luar negeri, Saudi itu sudah sangat sensitif, dia harus yang bijak itu Menteri Luar Negeri, karena Menlu itu bicaranya pasti punya data, pasti dia tahu Saudi Arabia. Jadi Menteri Agama saya bilang jangan asal omong saja. Gitu," katanya.

Terkait negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi, ia berharap Menlu juga berhati-hati. Pasalnya, kondisi pemerintah Arab Saudi masih sensitif.

"Tapi yang pasti, satu kalimat Menlu kan bisa satu hubungan negara itu kan perang, jadi Menlu itu harus dia pahami. Menurut saya, Menag harus hati-hati, kasih saja Menteri Luar Negeri (berdiplomasi)," kata Iskan.

### Komisi VIII DPR Akan Data Jemaah Umrah yang Merugi

Iskan mengatakan Komisi VIII akan mendata jemaah umroh yang mengalami kerugian, apalagi jemaah yang uangnya tak dapat dikembalikan.

"Kami dari Komisi VIII sudah membuat road map ke depan, jangka pendek. Kami



akan melihat orang-orang yang kena kerugian yang dampak besar, pas mau berangkat kemarin, tiba-tiba uangnya tidak bisa dikembalikan, kita berharap, mungkin berdampak paling besar itu sekitar 5 hari atau 2-3 hari sesudahnya (kebijakan penyetopan perjalanan umroh ditetapkan, yang memang uang dari hotel tidak bisa dikembalikan," ujar Iskan di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/1/2020).

Iskan mengatakan dana kemaslahatan haji akan digunakan untuk menutup kerugian jemaah. Warga miskin

diutamakan.

"Tu kan ada yang namanya dana kemaslahatan haji. Itu kan dana keuntungan dari haji dan umroh. Kita akan coba bantu mereka yang tidak bisa berangkat. Yang benar-benar miskin itu harus kita selamatkan. Sekarang sedang kami data," tutur Iskan.

Selain itu, Komisi VIII DPR akan mendata sejumlah biro perjalanan umroh untuk melakukan penjadwalan ulang. "Kedua, road map supaya (agen) travel melakukan reschedule lagi, karena kita belum tahu sampai kapan (kebijakan penyetopan umroh)," tandasnya.

# WNI di Kapal Diamond Princess Minta Dievakuasi, HNW Berharap Presiden Jokowi Peduli

Berharap sangat Presiden @jokowi peduli dengarkan dan segera perintahkan, untuk evakuasi WNI yang ada di Kapal Pesiar Diamond Princess tidak dengan kapal, melainkan dengan pesawat, seperti yang dulu dilakukan untuk WNI di Wuhan. Agar semuanya selamat dari virus Corona

## **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Anggota DPR RI Dapil DKI II meliputi Luar Negeri

Politisi PKS Hidayat Nur Wahid berharap video WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess sampai ke Presiden RI Joko Widodo.

Akibat virus corona yang merebak, WNI yang berada di kapal sampai saat ini belum dievakuasi. Ia berharap, Jokowi dapat melihat video tersebut dan langsung membantu mereka menggunakan pesawat seperti saat mengevakuasi WNI di Wuhan.

"Berharap sangat Presiden @jokowi peduli dengarkan dan segera perintahkan, untuk

evakuasi WNI yang ada di Kapal Pesiar Diamond Princess tidak dengan kapal, melainkan dengan pesawat, seperti yang dulu dilakukan untuk WNI di Wuhan. Agar semuanya selamat dari virus Corona," tulis @hnurwahid di Twitter.

Seperti diketahui, para WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess meminta Pemerintah untuk menjemput mereka secepatnya dengan pesawat bukan dengan kapal yang membutuhkan waktu lama.

"WNI Kru Kapal Pesiar

Diamond Princess menitipkan melalui @abcaustralia\_id video yang ditujukan kepada Presiden @Jokowi. Para kru meminta pemerintah Indonesia segera menjemput mereka dari Yokohama, Jepang," tulis @abcaustralia\_id di Twitter.

Video yang berdurasi satu menit lebih ini, memperlihatkan 10 orang WNI yang memakai masker dan membawa secarik kertas putih dengan tulisan.

"Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat. Kami yang berada dalam Princess di Yokohama sudah sangat takut



ibaratnya dibunuh secara perlahan. Kami di sini untuk menghidupi keluarga yang ada di Indonesia. Jangan biarkan kami sakit dan mati perlahan-lahan karena kelamaan dievakuasi," ujar seorang wanita dalam video.

Para WNI kru kapal Diamond Princess mengaku sudah di tes dan negatif terjangkit Virus Corona, sementara yang positif terjangkit virus tersebut sudah dievakuasi.

"Kru juga menyampaikan

keterangan dari kapten kapal bahwa kru Indonesia adalah satu-satunya yang sampai saat ini belum ada kepastian soal penjemputan, sementara kru lainnya seperti dari India dan Filipina sudah terkonfirmasi akan dijemput Senin (24/2) dan Selasa (25/2)," tulisnya.

Dalam keterangan, para WNI kru kapal Diamond Princess ini belum dikarantina sejak kapal bersandar di Yokohama, 4 Februari 2020 lalu.[]



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Silaturahmi ke DPP Golkar  
**PKS Siap Kerjasama  
Lebih Erat Untuk  
Kepentingan Rakyat**

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

*Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar malam ini semakin mengokohkan jalinan silaturahmi, komunikasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik di DPR. Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detail di parlemen*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA:

# Golkar Partai Besar dan Senior, PKS Siap Kerjasama Lebih Erat untuk Kepentingan Rakyat

Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar malam ini semakin mengokohkan jalinan silaturahmi, komunikasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik di DPR. Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detail di parlemen,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (25/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahmi ke Partai Golkar, dipimpin langsung Presiden PKS Sohibul Iman dan diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta Sekjen dan para Wakil Ketua Umum. Dari PKS turut mendampingi Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Bendum PKS Mahfudz Abdurrahman, para Ketua DPP PKS Almuzamil Yusuf, Chairul Anwar dan Hermanto serta Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Ecky Awal Muharram dan

Adang Darajatun.

Kunjungan ini selain bertujuan mempererat silaturahmi politik dan kebangsaan juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang semakin erat dengan Partai Golkar dalam berbagai isu seperti pilkada dan isu-isu politik di parlemen. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.

"Partai Golkar ini partai besar, partai senior di republik ini. Kami menaruh hormat dan dengan kerendahan hati banyak belajar dari Partai Golkar. Ben-

tuk kongkritnya kami ingin membangun kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu politik dan kebangsaan baik di pentas politik nasional maupun lokal (pilkada), juga dalam isu-isu kebijakan di DPR," ungkap Jazuli.

Kalau di DPR, lanjut Jazuli, Fraksi PKS telah lebih dulu datang menyambangi Fraksi Partai Golkar dan hingga saat ini terus menjalin komunikasi intensif karena banyak isu parlemen yang saling beririsan menyangkut agenda pembahasan RUU, pengawasan, dan anggaran negara.

"Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar malam ini semakin mengokohkan jalinan silaturahmi, komunikasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik di DPR. Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detail di parlemen," jelas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal



rencana pembahasan omnibus law dan prioritas prolegnas 2020 lainnya. Yang juga tak kalah penting tentang pembelaan bersama atas kepentingan rakyat kecil.

Soal omnibus law dan reformasi sektor ekonomi pada umumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan hal itu harus diletakkan dalam rangka transformasi struktural Indonesia. Karena itu dia berharap substantasinya harus sesuai dengan tiga koridor, yaitu koridor

konstitusi, koridor keadilan bagi semua pihak, dan koridor prinsip-prinsip otonomi daerah.

Jazuli dalam pertemuan tersebut menyampaikan posisinya PKS yang konsen betul terhadap kemandirian ekonomi anak bangsa. Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah—dimana Golkar ada di dalamnya—harus jelas keberpihakannya pada permodalan UMKM.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI Keadilan SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## **Indonesia dorong Pemerintah India selesaikan Konflik Horizontal**

*Saya berharap pemerintah India bisa segera menyelesaikan konflik ini sampai keakar-akarnya. Mari kita jaga harmoni antar umat beragama, Kami berharap India bisa segera aman dan damai kedepannya*

**Dr. H. Mardani, M.Eng**

*Wakil Ketua BKSAP DPR RI*

# Mardani: Indonesia dorong Pemerintah India selesaikan Konflik Horizontal

“Saya berharap pemerintah India bisa segera menyelesaikan konflik ini sampai keakar-akarnya. “Mari kita jaga harmoni antar umat beragama, Kami berharap India bisa segera aman dan damai kedepannya

**Dr. H. MARDANI, M.Eng.**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (27/02) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mengungkapkan keperihatinan atas kerusuhan berdarah dan pembakaran Mesjid di New Delhi, India pada Rabu (26/02).

“Saya secara pribadi mengucapkan turut berla sungkawa atas kerusuhan ini,” kata Mardani, Kamis (27/02).

Mengutip Laman BBC, Jumlah orang yang terbunuh dalam kerusuhan selama beberapa hari di ibu kota India, Delhi, bertambah menjadi 27 orang

Mardani menyesalkan intensitas konflik horizontal semakin meningkat di negeri Taj

malah itu, “Saya menyesalkan hal ini bisa terjadi dan semakin panas,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKS DPR RI itu berharap pemerintah setempat bisa segera menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya.

“Saya berharap pemerintah India bisa segera menyelesaikan konflik ini sampai keakar-akarnya,” katanya.

Mardani mengatakan menjaga harmoni antar umat beragama penting untuk menyelesaikan kohesi sosial di masyarakat.

“Mari kita jaga harmoni antar umat beragama, Kami

berharap India bisa segera aman dan damai kedepannya,” pungkasnya.

Seperti di ketahui bahwa konflik ini awalnya berasal protes damai yang dilakukan kelompok muslim atas usulan amandemen UU kewarganegaraan India yang disebut Citizenship Amandment Act (CAA) yang dianggap mendiskriminasi kelompok muslim.

Protes ini berujung konflik kekerasan ketika kelompok pendukung CAA yang diwakili oleh kelompok nasionalis hindu menyerang aksi protes yang dilakukan oleh kelompok muslim.



كتلة حزب العدالة والرفاه يدعو الحكومة إلى

# حث الهند على ايقاف العنف والتعصب ضد المسلمين في البلد

”

إن حماية المواطنين وامنتهم من أعمال الاضطهاد والتعصب والتمييز هي الشيء الرئيسي لبلد ما. نحن واثقون بالهند ونأمل أن تتمكن من حل هذه المشكلة بشكل جيد حتى يتمكن الناس - من مختلف الديانات و من مختلف الأعراق- من التعايش بسلام وبانسجام

## الدكتور جزولي جويني

رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب الندونيسي

أكد عضو اللجنة الأولى في مجلس النواب، أنه لا يوجد مبرر لتبرير العنف على أساس التعصب والتمييز. الهند كدولة كبيرة ذات سيادة فيها، يجب أن تكون قادرة على تحقيق السلام في وسط شعبيها على مبدأ المساواة والعدالة للجميع. وحل الخلافات عن طريق الحوار.

إن حماية المواطنين وامنتهم من أعمال الاضطهاد والتعصب والتمييز هي الشيء الرئيسي لبلد ما. نحن واثقون بالهند ونأمل أن تتمكن من حل هذه المشكلة بشكل جيد حتى يتمكن الناس - من مختلف الديانات و من مختلف الأعراق- من التعايش بسلام وبانسجام ، هكذا قال جزولي.

ومع ذلك ، أنه إذا لم تتمكن الهند والأحزاب السياسية داخلها من تقديم هذا الضمان ، فبأساس الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام العالمي ، نطلب من هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل للتحقيق والحفاظ على الأمن وضمان سلامة المواطنين وأقلية المسلمين الهنود. كجزء من مواطني العالم.



اليميني ناريندرا مودي. اماحزبيا الحامل - بهارتا جاناتا (حزب بهاراتيا جاناتا) فمتهم بالتمييز ضد المسلمين. هذا ما أدى إلى احتجاجات المسلمين الهنود التي أدت إلى اشتباكات وحرق المساجد والمستوطنات الإسلامية.

وفقًا للأخبار ، وقع الصدام بسبب إقرار قانون الجنسية المثير للجدل في الهند. لأن القانون يسمح للهند بمنح وضع المواطنة للمهاجرين الذين يقبلون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية مثل بنغلاديش وباكستان وأفغانستان.

ومع ذلك ، لا تمنح حالة الجنسية إلا للمهاجرين الذين يعترفون الديانة الهندوسية والمسيحية وغيرها من ديانات الأقليات إلى جانب الإسلام. تمت الموافقة لهذا القانون على اللاحقة من قبل رئيس الوزراء

جاكرتا (٢٨/٢) - المصادمات والعنف الشديد الذي أصاب المسلمين في الهند والذي أدى إلى مقتل ٢٧ شخصًا وإصابة أكثر من ٢٠٠ شخص في قلق عالمي. دعا رئيس كتلة حزب العدالة والرفاه جزولي جويني ، حكومة جمهورية إندونيسيا إلى حث الهند بنشاط على ايقاف العنف لأنه يتعلق بالإنسانية العالمية. \* إندونيسيا كعضو من أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومجلس

الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، فضلًا عن صاحبة الهند المحبة للسلام و فضلًا أيضا عن كون إندونيسيا دولة ذات غالبية مسلمة . فإن الأخبار التي تنشر الصدام بسبب التعصب والتمييز ضد الأقليات المسلمة في الهند ، تزج وتقلق القلوب بوضوح وتثير المخاوف . يجب على إندونيسيا أن تتصرف بحزم شديد ويحث الهند على ايقاف أعمال العنف والتعصب والتمييز .\*

مجلس حقوق الإنسان ومجلس

# Ambil Pelajaran dari India, Toriq: Produk UU harus naungi Semua Golongan

Sebuah peraturan tidaklah boleh melanggar HAM seseorang terutama dalam memeluk agama yang diyakininya. Selain itu sebuah produk hukum tidak boleh diskriminatif terhadap golongan atau agama tertentu, produk hukum harus menaungi seluruh golongan masyarakat

## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (27/02) —Anggota Komisi I DPR RI, Toriq Hidayat sangat menyangkan dan prihatin atas jatuhnya korban pada aksi unjuk rasa di New Delhi India.

"Saya sungguh prihatin dan sangat menyangkan atas aksi unjuk rasa di India yang menyebabkan 13 orang tewas dan pengrusakan rumah ibadah", ungkap Toriq.

Ketegangan di beberapa bagian kota New Delhi masih tinggi dan sekolah-sekolah tetap tutup di beberapa daerah. Setidaknya lima stasiun kereta metro di kota itu ditutup.

Toriq berharap situasi ini tidak berimbas kepada warga Indonesia di New Delhi.

"Pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian luar negeri harus proaktif memantau dan memberi perlindungan kepada warga Indonesia di sana", pinta Toriq.

Undang Undang ( UU ) Amandemen Kewarganegaraan di India telah menuai protes. UU ini telah mengubah UU Kewarganegaraan tahun 1955 dengan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Dimana dalam amandemen UU tersebut

memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan India hanya bagi non Muslim dari negara-negara tetangga mayoritas muslim.

"Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dan Hukum seharusnya tidak boleh diskriminatif", tegas Toriq.

Anggota dari PKS ini mengkritik bahwa UU ini adalah upaya mencegah muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

"Pemerintah India akan memberikan kemudahan



mendapatkan kewarganegaraan India kepada non muslim di negara-negara Muslim tetangga tapi mengecualikan warga Rohingya Myanmar yang teraniaya dikarenakan mereka muslim", ungkap Toriq

Pemerintah India diharapkan bersikap bijaksana dalam mengeluarkan sebuah aturan hukum.

"Sebuah peraturan tidaklah boleh melanggar HAM seseorang terutama dalam memeluk agama yang diyakininya. Selain itu sebuah produk hukum tidak

boleh diskriminatif terhadap golongan atau agama tertentu, produk hukum harus menaungi seluruh golongan masyarakat", Tambah Toriq

Kejadian di India, lanjut Toriq, seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk Indonesia. Agar jangan sampai membuat sebuah produk UU yang nantinya akan membuat perpecahan ditengah-tengah masyarakat dikarenakan diskriminatif terhadap suatu golongan.

Foto : dpr.go.id

# Sebagai DK PBB Indonesia Harus Ambil Tindakan Tegas Terhadap India

Pemerintah bisa mengambil peran mulai dari memanggil Dubes India untuk Indonesia, membawa permasalahan ini ke PBB. Sedangkan rakyat Indonesia bisa melakukan gerakan boikot film India. Salah satu industri yang menopang ekonomi India

## H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (29/02) — Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM), rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan atas kekerasan agama di India. Pernyataan tertulis ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Jumat, (28/02/2020).

"Negara Indonesia sebagai negara maju yang menjunjung tinggi HAM serta memiliki sikap bebas aktif dalam hubungan antar negara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam permasalahan dunia, salah satunya permasalahan kemanusiaan di India," kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini.

Pemerintah India, lanjut Sukamta, tidak bisa melindungi

warga negaranya ketika terjadi kekerasan kepada minoritas Muslim oleh mayoritas Hindu. Akibatnya 20 orang tewas, 189 orang lainnya terluka, dengan 60 korban luka tembak.

"Masjid tempat ibadah kaum muslimin serta toko-toko sekitarnya dibakar oleh orang-orang yang menolak perbedaan," jelas Sukamta.

Sukamta menegaskan Pemerintah India telah melanggar Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi.

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan mayoritas berpenduduk muslim, maka pemerintah Indonesia harus bersikap terhadap masalah ini. Selain itu

pemerintah harus mendorong PBB untuk mengambil tindakan tegas atas diskriminasi pemerintah India terhadap rakyat India yang beragama muslim. Jika tidak ada tindakan tegas maka kejadian akan berulang," tuntut Sukamta.

Menurut Sukamta, Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, harus ikut serta dalam usaha pencapaian misi perdamaian dunia.

"Pemerintah bisa mengambil peran mulai dari memanggil Dubes India untuk Indonesia, membawa permasalahan ini ke PBB. Sedangkan rakyat Indonesia bisa melakukan gerakan boikot film India. Salah satu industri yang menopang ekonomi India," tutup Anggota DPR RI dapil DI Yogyakarta.

Sebelumnya, bentrokan terjadi di India yang melibatkan dua kubu yang pro dan kontra UU Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA). Akibatnya, sejumlah warga meninggal dunia dan mengalami luka-luka





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## ***Terkait Jiwasraya, PKS Harap Benny Tjokro Ungkap Dalang yang Rugikan Negara 13,7 T***

*Kasus Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung.*

***DR. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H.,M.H***  
*Anggota Komisi III DPR RI*

# Terkait Jiwasraya, PKS Harap Benny Tjokro Ungkap Dalang yang Rugikan Negara 13,7 T

Kasus Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung

## **Dr. H.R. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (25/02) — Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dimiyati Natakusumah berharap, tersangka skandal Jiwasraya yang juga Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (Bentjok) bisa menjadi whistle blower.

Dimiyati berharap Benny bisa mengungkap mega skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 triliun lebih. Dengan begitu, kasus ini bisa terungkap secara keseluruhan.

Menurut Dimiyati, kasus

Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung.

Hal ini dikatakan Dimiyati dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III Parlemen, Senayan, Kamis (20/2/2020).

"Coba saja dilihat time schedule-nya. Di zaman era lalu

atau sekarang atau sedang? Nanti akan kelihatan zaman dulu sudah berapa? Ini kan skandal dimana yang yang disikat besar maka akan terlihat siapa pemainnya," kata Dimiyati.

Menurutnya, dalam permainan korupsi besar pemainnya bisa empat hingga lima kaki. Pertama adalah birokrasi.

"Enggak mungkin tanpa direksi, komisaris, eksekutif, legislatif. Enggak mungkin Bentjok itu bermain sendirian. Nah kita mau buka sebar-lebarnya, karena ini merusak negara," tuturnya.

Kaki kedua adalah kelompok white collar crime. "Siapa yang mendadak kaya? Ada apa ini, siapa brokernya?" katanya.

Kelompok ketiga adalah oknum penegak hukum. Menurutnya, jika penegak hukum berani tegas dan kuat maka tidak mungkin skandal seperti ini terjadi karena semua orang pasti akan takut melakukan penyimpangan. "Kalau sistemnya bagus enggak



mungkin berani," tuturnya.

Kaki berikutnya yakni oknum pengawas dan auditor. "Sekarang dibuka saja siapa pegang uangnya, siapa yang mencatatnya maka oleh sebab itu perlu dibuat pansus. Kalau tidak disepakati maka gak bisa terwujud," ungkapnya.

Menurut Dimiyati, pembentukan Pansus akan lebih efektif karena di dalamnya ada sisi keuangan dari Komisi XI, ada yang terkait BUMN, maupun hukum yang menjadi satu dalam Pansus.

Meskipun diakuianya pembentukan bakal sulit terwujud secara politik karena hanya PKS dan Partai Demokrat yang jumlahnya 104 orang sementara fraksi lainnya hanya menginginkan dibentuk panitia kerja (panja).

Karena itu, dirinya mendesak pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus. "Bacakan saja, soal nanti disepakati atau tidak, selesai," pungkasnya.

Foto : dpr.go.id

# Komisi III DPR Desak Dewan Pers Turunkan Satgas Anti Kekerasan Jurnalis

Ini harus dilakukan secepatnya, agar dituntaskan sehingga menghilangkan rasa was-was dari saksi korban dan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta agar melakukan perlindungan terhadap korban dan keluarganya

## H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Aceh

Banda Aceh (25/02) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Aceh, Nasir Djamil, mendesak Dewan Pers segera menurunkan Tim Satgas Anti Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia khususnya Aceh.

Selama ini kata Nasir Djamil, kekerasan terhadap jurnalis sering sekali dialami oleh wartawan yang menjalankan tugas di Aceh dan di Indonesia. Jadi, harus ada peranan Dewan Pers untuk melindungi para wartawan yang menjalankan tugasnya sebagai kuli tinta di lapangan yang mengungkap fakta-fakta sesuai kode etik jurnalistik.

"Kekerasan terhadap wartawan harus dituntaskan.

Dewan Pers harus bersinergi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap jurnalis," ujar Nasir Djamil, Senin (24/02/2020).

Kata dia, Dewan Pers perlu sekali membentuk Satgas anti kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja melakukan investigasi (ad hoc) di lapangan lebih mendalam untuk mengungkap dan mengali fakta-fakta yang terjadi terhadap wartawan yang mengalami kekerasan akibat karya jurnalistik.

"Kepedulian Dewan Pers ini juga akan memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi para para wartawan di Aceh khususnya ketika menjalankan tugasnya meliputi dan mengungkap fakta-fakta jurnalistik sehingga

mereka lebih berani mempublikasikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat", tegasnya.

Nasir Djamil juga menyinggung, kasus pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia di Aceh Tenggara yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019, dan hingga kini belum terungkap pelaku serta motifnya.

"Sementara hasil penelitian petugas laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Medan menyatakan rumah wartawan harian Serambi Indonesia di Aceh Tenggara tersebut dibakar. Namun, pelakunya belum ditangkap," pungkasnya.

Pihaknya, berharap kepada Kapolda Aceh, Irfen Pol Wahyu Widada agar memback up dan membentuk tim khusus yang melibatkan pihak Polda Aceh untuk bekerjasama menuntaskan kasus pembakaran rumah, Asnawi Luwi wartawan harian Serambi Indonesia di Agara yang sudah memasuki tujuh bulan.

"Ini harus dilakukan secepatnya, agar dituntaskan sehingga menghilangkan rasa was-was dari saksi korban dan



kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta agar melakukan perlindungan terhadap korban dan keluarganya," ujar Nasir Djamil

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Juli Amin menyambut baik pembetukan satgas khusus oleh Dewan Pers yang nantinya diturunkan khusus ke Aceh.

"Satgas betukan Dewan Pers ini merupakan gabungan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indo-

nesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)," tutur Nasir.

Dengan dibentuknya, kata Nasir, satgas khusus sebagaimana yang pernah diturunkan ke Papua Barat dan Medan di tahun 2019 lalu, dapat membantu mengungkap persoalan sesuai hasil investigasi mereka di lapangan nantinya. Karena, masih ada kasus kekerasan terhadap jurnalis di Aceh yang hingga saat ini pelakunya belum ditangkap.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***DPR Harap Produk Hasil Pertanian Dapat Efisien dan Maksimal***

*Selama ini banyak kinerja pertanian pangan kita tidak efisien akibat tidak tepat. Sebagai contoh mudahnya tidak tepatnya masa tanam, panen yang meleset dan bibit yang tidak tepat mutu. Akibat utama melesetnya segala aktivitas pertanian ini sebagian besar akibat tidak tepatnya dukungan anggaran.*

***Drs. Hamid Noor Yasin, M.M***

*Anggota Komisi IV DPR RI*



# DPR Harap Produk Hasil Pertanian Dapat Efisien dan Maksimal

Selama ini banyak kinerja pertanian pangan kita tidak efisien akibat tidak tepat. Sebagai contoh mudahnya tidak tepatnya masa tanam, panen yang meleset dan bibit yang tidak tepat mutu. Akibat utama melehetnya segala aktivitas pertanian ini sebagian besar akibat tidak tepatnya dukungan anggaran

## Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (28/02) — Anggota DPR RI Komisi IV Hamid Noor Yasin di akhir-akhir sidang DPR menjelang Reses pada Februari 2020 meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar seluruh produk hasil pertanian dapat tepat dan maksimal. Yang ia maksud tepat adalah dukungan anggaran tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat hasil.

"Selama ini banyak kinerja pertanian pangan kita tidak efisien akibat tidak tepat. Sebagai contoh mudahnya tidak tepatnya masa tanam, panen yang meleset dan bibit yang tidak tepat mutu. Akibat utama

melehetnya segala aktivitas pertanian ini sebagian besar akibat tidak tepatnya dukungan anggaran", Jelas Hamid.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini menekankan kepada pemerintah, untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan dalam negeri ini perlu ada posisi dan rekomposisi anggaran yang memadai. Dan yang paling mampu di negara ini untuk menyokong para petani kita dari sisi anggaran adalah pemerintah melalui APBN.

DPR RI, lanjut Hamid, sudah sangat mendukung pemerintah dari sisi anggaran

untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian kita melalui persetujuan DPR di APBN. Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020 sebesar Rp21,05 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp21,71 triliun. Namun untuk subsidi Pupuk kita relatif cukup besar. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dewan Perwakilan Rakyat resmi sepakat alokasi subsidi pupuk pada tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun.

"Memang saya sangat menyangkan, tahun 2020 alokasi APBN kementan dan Subsidi pupuk turun semua dibanding tahun 2019. APBN kementan turun sekitar 660 milyar. Sedangkan subsidi pupuk turun sekitar 2,4 triliun. Namun turunnya anggaran sektor pangan ini menjadi tantangan menteri pertanian baru di kabinet jilid 2 untuk membuktikan kemampuannya meningkatkan hasil produk pertanian yang melimpah di negeri ini", tukas Hamid.

Politisi PKS ini berharap kepada pemerintah, setelah



pemerintahan berjalan selama 5 bulan ini, ada perencanaan dan pelaksanaan realisasi anggaran sektor pertanian pangan ini tepat sehingga ada efisiensi dalam pencapaian target-target bersama. Pada medio Februari lalu, lanjut Hamid, pemerintah melalui kementan memang sudah meminta kenaikan anggaran subsidi pupuk agar sama dengan tahun 2019. Namun Kementerian keuangan tidak setuju akibat adanya rilis terbaru lahan baku sawah Kementerian ATR (Agraria dan Tata Rua-

ng) seluas 7,46 juta ha dan sudah tidak teralokasinya pupuk subsidi untuk petani tambak.

"Saya berharap amanat penyediaan produk hasil pertanian kita ini mampu di sediakan oleh produksi dalam negeri. Dengan memanfaatkan kelimpahan kekayaan aset produk pertanian dalam negeri, semoga isu-isu impor pangan ini tidak terulang. Impor tidaklah tabu, tapi kalo impor pangan yang meresahkan rakyat, inilah yang perlu dihindari", tutup Hamid Noor Yasin.

# DPR Akan Jaga Amanah Reformasi Pada Omnibus Law Cipta Kerja

*Environmental justice* bisa kita tegakkan dengan tetap menjadikan Izin lingkungan sebagai dasar bagi pemberian izin usaha. *Social justice* perlu menjadi perhatian khusus agar mampu mengakomodasi kebutuhan pada masyarakat adat yang tinggal pada kawasan hutan

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (28/02) — Legislator PKS asal Sukabumi, Slamet mengingatkan kepada semua pihak agar Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjaga amanah reformasi.

Anggota DPR RI yang pernah menjadi bagian dari aktor reformasi ini ingat betul bagaimana bangsa ini bertransformasi dari masa ke masa untuk selalu mencari jati diri bangsa, namun hingga kini belum memiliki kekokohan dalam perjuangan stabilitas ekonomi, politik dan budaya.

“Perundangan pasca

reformasi punya semangat untuk mewujudkan *\_social justice\_* dan *\_environmental justice\_*. Keadilan sosial dan keadilan lingkungan merupakan hal mendasar yang mesti tercermin pada pasal-pasal di Omnibus Law Cipta Kerja”, tukas Politisi PKS ini.

Legislator dapil Jawa Barat 4 ini menambahkan, bahwa investasi dan industrialisasi penting bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, serta menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, lanjut dia, perlu kesadaran kita

bersama agar kita memiliki fokus tujuan ekonomi pembangunan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi nasional harus dibangun secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan”, katanya.

Anggota Legislatif yang merupakan ketua kelompok komisi IV Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sumber daya alam yang ada hari ini, harus mampu kita kelola untuk kepentingan hari ini dan juga



kepentingan generasi yang akan datang.

Menurut Slamet, komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menyampaikan kepada ibu Menteri agar investasi tidak mengorbankan kepentingan hutan dan lingkungan. Secara khusus Ketua Poksi IV FPKS ini memberikan beberapa catatan atas draft Omnibus Law Cipta Kerja pada sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Slamet menjelaskan bahwa *\_Environmental justice\_* bisa kita tegakkan dengan tetap menjadikan Izin lingkungan sebagai dasar bagi pemberian izin usaha. *\_Social justice\_*

perlu menjadi perhatian khusus agar mampu mengakomodasi kebutuhan pada masyarakat adat yang tinggal pada kawasan hutan. Selain itu, ada satu hal yang merupakan amanah utama reformasi yakni Otonomi daerah.

“Segala bentuk sentralisasi tidak dapat kita kompromikan. Ada hal penting yang perlu kita soroti, yakni Otonomi Daerah. Saya membaca bahwa adanya kewenangan daerah dalam pembentukan komisi penilai dampak lingkungan yang coba dihilangkan dan kembali ditarik ke pemerintah pusat”, tutup Slamet.

# DPR Sarankan Tambah Kapal dan Modernisasi Senjata untuk Kawal Laut Natuna

Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumberdaya laut lainnya oleh nelayan negara asing

## **Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto mendesak Pemerintah agar menambah anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola ruang laut Kepulauan Riau terutama yang berbatasan dengan negara tetangga.

Menurut Hermanto, bentuknya berupa pengembangan kapal tangkap, modernisasi teknologi tangkap, peningkatan kualitas SDM nelayan serta peningkatan pengawasan laut dan ikan.

"Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa

Indonesia umumnya. Sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumberdaya laut lainnya oleh nelayan negara asing", papar Hermanto kepada wartawan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 4 DPR ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Jumat (21/02/2020).

Ia mengungkapkan, 98 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau merupakan laut. Adapun yang 2 persen merupakan darat berbentuk pulau-pulau. Hamparan laut yang luas tersebut, berbatasan langsung dengan lima negara tetangga.

"Sayangnya, pemerintah

belum optimal menggali potensi sumberdaya kekayaan laut dan ikan di kawasan tersebut karena minimnya anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan", ujar legislator FPKS ini.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, rombongan Komisi 4 DPR mendengar langsung keluhan jajaran PSDKP Batam bahwa kapal patroli dan perlengkapan senjata untuk melakukan pengawasan sangat minim dan jauh tidak sebanding dengan kawasan laut yang harus dikawal. Kondisi ini sangat membuka peluang bagi nelayan asing masuk ke kawasan ZEE Indonesia. Kawasan yang kerap kail dimasuki kapal nelayan asing adalah Laut Natuna dan Cina Selatan.

"Di kedua laut tersebut petugas sering memegoki kapal nelayan asing dan tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan. Karena itu penambahan armada kapal dan persenjataan modern untuk melindungi petugas sudah sangat urgen dan mendesak," pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini.



## Anggota Komisi IV DPR

# Pemerintah Harus Serius Perbaiki Kondisi Garam Nasional

Kebijakan pergaraman nasional dalam bentuk peta arah pergaraman nasional harus segera diwujudkan pemerintah sebagai landasan utama bagi proses bisnis pergaraman di tanah air. Pembentukan tata niaga pergaraman nasional menjadi hal krusial dibentuk saat ini

### H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (26/02) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, saat melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta semua jajarannya, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, menegaskan kepada pemerintah agar mulai tahun 2020 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya untuk lebih serius dan kerja keras memperbaiki kondisi garam nasional.

Johan menilai berdasarkan dokumen perencanaan pemerintah yang menargetkan produksi garam nasional untuk tahun 2020 hanya sebesar 3 juta ton, bahkan sampai tahun

2024 hanya menargetkan produksi garam nasional sebesar 3,4 juta ton.

Berdasarkan data tersebut, Anggota Fraksi PKS ini mempertanyakan kenapa begitu rendahnya target Produksi Garam Nasional.

Padahal pada masa Menteri sebelumnya saja, berdasarkan data tahun 2018 dan 2019 target produksi Garam mencapai 4,1 juta ton/ tahun dan telah terealisasi tahun 2019 produksi garam nasional sebesar 2,85 juta ton.

Anggota DPR RI dari dapil NTB 1 ini memaparkan bahwa jika dibandingkan dengan

negara lain, kita tertinggal jauh dengan China yang mampu memproduksi garam 68 juta ton/tahun, Amerika memproduksi 44 juta ton, bahkan Ukraina mampu memproduksi sebesar 6,1 juta ton padahal negara tersebut hanya memiliki garis pantai 2.782 KM. (lebih panjang sedikit garis pantainya dari NTB; yakni 2.333 KM).

"Perlu kita sadari, bahwa negara kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 54.716 KM dan sampai hari ini belum memiliki terobosan strategi untuk bisa masuk dalam jajaran 10 besar negara produsen garam dunia, dan malah terjebak pada kebijakan impor garam yang tentunya merugikan kondisi garam nasional dan melemahkan kondisi petani garam kita." Urai Johan pada saat rapat kerja tersebut.

Selanjutnya Johan selaku wakil rakyat dari Pulau Sumba wa ini, menegaskan kepada pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi tambak garam rakyat, terutama memecahkan problematika produksi yaitu produksi garam nasional yang



sangat bergantung pada iklim, teknologi yang digunakan masih sangat tergantung pada faktor cuaca dengan iklim kemarau yang relatif pendek.

Pemerintah perlu menyadari bahwa produksi garam merupakan bidang usaha 'padat karya' dengan daya tampung tenaga yang cukup besar, lokasi pegaraman yang mempunyai skala yang bervariasi, kondisi produsen yang ada umumnya adalah petani garam yang secara sosial ekonomi tergolong

lemah serta belum lagi dari struktur kepemilikan lahan dengan petani pemilik tanah dan petani penggarap dengan sistem pembagian yang belum adil bagi penggarap; adanya keterbatasan modal kerja sehingga petani terperangkap dalam sistem ijon; dan rendahnya harga garam petani menyebabkan sebagian lahan pegaraman rakyat telah beralih fungsi dan hal ini menyebabkan produksi garam semakin menurun. Selengkapnya di fraksi.pks.id

ARI 2020



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***Omnibus Law Hapus Ketentuan Batas Usia Pesawat, Syaikhul : Bahaya Bagi Keselamatan Penumpang***

*Bagaimana cara pemerintah melakukan pengawasan terhadap itu semua ? Karena sudah bisa dipastikan, akan banyak operator pesawat yang masuk sehingga semakin banyak pihak yang harus diawasi oleh pemerintah sebagai regulator*

***H. Ahmad Syaikhul***  
*Anggota Komisi V DPR RI*

## Omnibus Law Hapus Ketentuan Batas Usia Pesawat

# Syaikhu: Bahaya Bagi Keselamatan Penumpang

Sebaiknya ditinjau kembali. Ini beresiko besar bagi keselamatan penumpang. Jangan sampai rakyat jadi korban,

### H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (29/02) — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menanggapi rencana dihapuskannya ketentuan persyaratan batas usia pesawat di Omnibus Law. Politisi PKS itu khawatir dengan keselamatan penumpang.

Penghapusan tersebut menurut Syaikhu berpotensi besar terhadap berkurangnya standar keselamatan penerbangan. Ini tentu saja membahayakan keselamatan penumpang.

"Dengan penghapusan ini, maka ada potensi besar berkurangnya standar keselamatan karena bisa saja batas usia pesawat tidak diatur lagi. Resikonya kepada penumpang," ujar Syaikhu.

Lebih lanjut Syaikhu menjelaskan, kekhawatiran terhadap keselamatan

penumpang sangat beralasan. Sebab banyak aturan lain dari UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dihapuskan di Omnibus Law, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap faktor-faktor keselamatan penumpang. Diantaranya manajemen produksi pesawat yang tidak terkontrol, kemungkinan beroperasinya pesawat yang tidak berasuransi, adanya operator-operator pesawat yang tidak layak, dan mutu perawatan pesawat yang rendah.

"Bagaimana cara pemerintah melakukan pengawasan terhadap itu semua? Karena sudah bisa dipastikan, akan banyak operator pesawat yang masuk sehingga semakin banyak pihak yang harus diawasi oleh pemerintah sebagai regulator," kata Syaikhu.

Karena itu, Syaikhu mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali rencana penghapusan aturan-aturan yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan penumpang. Sebab resikonya akan sangat besar.

"Sebaiknya ditinjau kembali. Ini beresiko besar bagi keselamatan penumpang. Jangan sampai rakyat jadi korban," pungkas Syaikhu.

Seperti diberitakan sebelumnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menghapus ketentuan persyaratan batas usia pesawat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 26 ayat 1 huruf(b) disebutkan bahwa pendaftaran pesawat diantaranya harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri.



# Syahrul Aidi: Gaji Kepala Desa Harus Ditingkatkan

Kepala desa sering dikunjungi oleh tamu baik dari desa itu sendiri, hingga tamu dari luar seperti bupati, camat, dan gubernur, beserta jajaran masing-masing.

Belum lagi dari pihak swasta hingga organisasi non pemerintahan. Namun Kades tidak memiliki anggaran rumah tangga (untuk tamu tersebut-red)

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau

Pekanbaru (25/02) — Syahrul Aidi, anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau kembali membuat heboh dengan perjuangan pro rakyat yang diusulkannya. Terbaru, Syahrul Aidi memperjuangkan honor kepala desa yang rendah, tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka miliki.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi saat melakukan rapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Terisolir, Abdul Halim Iskandar, pada Selasa (25/02/2020) di gedung Senayan Jakarta.

Kepala desa menurut Syahrul Aidi memiliki beban kerja yang sangat tinggi saat ini. Sementara, beban yang tinggi

itu tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Dia mencontohkan bahwa saat ini gaji kepala dusun adalah dua juta rupiah, sementara gaji kepala desa hanya dua juta lima ratus ribu rupiah. Dan juga, beban kepala desa itu tinggi, ketika ada musibah dan masalah di desa yang menghadapinya adalah kepala desa.

"Kepala desa sering dikunjungi oleh tamu baik dari desa itu sendiri, hingga tamu dari luar seperti bupati, camat, dan gubernur, beserta jajaran masing-masing. Belum lagi dari pihak swasta hingga organisasi non pemerintahan. Namun

Kades tidak memiliki anggaran rumah tangga (untuk tamu tersebut-red)," ujarnya saat rapat tersebut.

Beban yang besar ini harusnya juga diimbangi dengan tingkat kesejahteraan. Untuk itu, menurut Syahrul Aidi, negara harus memperhatikan hak-hak mereka, perhatikan honor mereka harus standar.

"Oleh karena itu, ayo, kita jangan hanya kita menuntut kepala desa agar bersih, menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, bebas korupsi, tetapi juga perhatikan hak-hak mereka. Gaji mereka harus standar," tegas mantan Anggota DPRD Kampar ini.



**Banjir Jadebotabek**

# PKS: Banjir Harus Jadi "Panggung" Tanggung jawab, Bukan Ajang Survey

Jangan sampai ketika terjadi banjir, justru menjadi panggungnya para pengamat politik dan lembaga survey (karena dikaitkan dengan Pemilu/ Pilkada). Padahal yang utama seharusnya menjadi panggung sekaligus tanggung jawab Gubernur sebagai para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk berbicara, menangani masalah tersebut, dan mencari solusi jangka panjang dalam penanganan banjir

## H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (26/02) — Terkait dengan kondisi banjir terkini beserta penanganan jangka panjang, Komisi V DPR RI hari ini (26/02) menggelar Rapat Kerja tentang Penanganan Banjir di Jabodetabek yang mengundang Menteri PUPR dan instansi lain terkait, serta para Gubernur terkait, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.

Namun yang disayangkan,

Raker Komisi V tidak dihadiri oleh para Gubernur terkait, walaupun sudah dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono serta pimpinan lembaga terkait lainnya.

Kritik terkait hal tersebut disampaikan oleh Suryadi Jaya Purnama, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI.

Meski mereka mengutus para bawahannya, kata Suryadi,

akan tetapi kehadiran para pimpinan daerah merupakan bentuk tanggung jawab dan keseriusan dalam penanganan banjir secara lebih strategis dan melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat.

"Jangan sampai ketika terjadi banjir, justru menjadi panggungnya para pengamat politik dan lembaga survey (karena dikaitkan dengan Pemilu/ Pilkada). Padahal yang utama seharusnya menjadi panggung sekaligus tanggung jawab Gubernur sebagai para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk berbicara, menangani masalah tersebut, dan mencari solusi jangka panjang dalam penanganan banjir", ujar pria yang akrab disapa SJP ini.

Tetapi menurut Suryadi, harusnya Pemerintah pusat pun juga bisa berbuat lebih, karena sudah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta dan daerah-daerah penyanggannya: Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

"Walaupun Perpres



tersebut masih perlu direvisi, karena dalam 10 tahun terakhir Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan megapolitan tersebut belum pernah diubah", tambah Suryadi.

Oleh karena itu Suryadi menyampaikan bahwa perlu

adanya keseriusan dalam penanganan banjir, khususnya di Jabodetabek.

"Bahkan kami mendorong diaturnya penanggulangan banjir ini dalam suatu peraturan yang lebih terpadu, lebih tegas dan lebih dapat dieksekusi", tutup Suryadi.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## *Jelang Reses, Rafli Suarakan Sejumlah Isu Prioritas termasuk Soal Potensi Ekonomi Aceh*

*Saya apresiasi Kepala BPKS yang sudah melakukan capaian sertifikat yang banyak, kita harap kedepan investasi lebih banyak dan dipermudah masuk ke Sabang*

**Rafli**

Anggota Komisi VI DPR RI

## Jelang Reses

# Rafli Suarakan Sejumlah Isu Prioritas termasuk Soal Potensi Ekonomi Aceh

Saya apresiasi Kepala BPKS yang sudah melakukan capaian sertifikat yang banyak, kita harap kedepan investasi lebih banyak dan dipermudah masuk ke Sabang

## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (29/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Aceh, Rafli menyoroti sejumlah isu yang ada dan dibahas dalam Komisi VI DPR RI jelang reses, Kamis, (27/02/2020).

Rafli yang dikenal dengan *yel - yel* bernada "Marilah Mari Memulai Dengan Semangat Baru" ini menyampaikan apresiasinya terhadap capaian sertifikat BPKS.

"Saya apresiasi Kepala BPKS yang sudah melakukan capaian sertifikat yang banyak, kita harap kedepan investasi lebih banyak dan dipermudah masuk ke Sabang," ungkap Anggota Dewan asal Aceh yang dikenal anti mainstream ini.

Dalam Rapat sebelumnya yang dihadiri Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Rafli

menyampaikan bahwa Lembaga KPPU juga menjadi harapan masyarakat, ini menjadi motivasi agar lebih berkonsentrasi.

"Saya berharap KPPU lebih semangat dan fokus lagi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan", pungkasnya, Senin, (29/02/2020).

Hari berikutnya, Selasa (25/02/2020) usai rapat tertutup Panja BUMN Energy Komisi VI menghadiratkan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, ditemui wartawan Rafli mengingatkan agar BUMN bisa aktif membantu kesejahteraan rakyat

"BUMN harus menjadi pundi - pundi yang mensejahterakan rakyat", tegas

Rafly yang juga pegiat seni ini.

Dalam Catatan Rafly, Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI, akan melakukan pendalaman terhadap segala rencana Pertamina.

"Rencana yang akan kami lakukan meliputi perbaikan manajemen subsidi, pengembangan energi baru terbarukan, kilang (refinery), dan harga gas serta pengembangan penggunaan gas dan investasi," papar Rafly.

Berlanjut di hari berikutnya, Rabu (26/02/2020) dalam Focus Group Discussion (FGD) antara Anggota DPR RI Komisi VI dan Pupuk Indonesia, politisi PKS ini menyuarakan tentang maksimalisasi distribusi pupuk.

"Saya minta distribusi pupuk lebih tepat langsung disalurkan ke petani dan pengawasan melalui koordinasi dengan sekda harus maksimal, untuk Aceh. Kemudian Produksi PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) yang ada di Aceh agar di prioritaskan," tandas Rafly.

Berdasarkan data, Rafly menyampaikan beberapa hal terkait produksi yang dilakukan



oleh PT. PIM yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Jika hari ini PT PIM memiliki daya produksi 1 juta ton, namun hanya diberikan hanya sekitar 300.000 ton, sementara Aceh butuh pupuk sekitar 350.000 ton, dan hari ini dikasih untuk Aceh 70.000 ton," ujarnya.

"Ini diskriminasi menurut saya, gas ada di Aceh, Pabrik juga ada Aceh, hal ini saya sampaikan kepada rakyat Aceh, bahwa Pupuk Indonesia

bertanggung jawab," tegas Rafly.

Jika PT PIM tidak diperkuat, Rafli prihatin dengan kondisi perusahaan plat merah itu yang seharusnya mampu menjawab keluhan pupuk dikalangan petani Aceh.

"Saya ingin PT. PIM harus diperkuat, kalau hari ini daya produksi 1 juta ton namun hanya diberi sebatas 300.000 ton, kasian PIM nya," Ucap Rafli

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# DPR Minta Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Kinerja Korporasi

Terhadap BUMN yang akan mendapatkan PMN, seharusnya agar dibuatkan KPI secara spesifik dan jelas setelah menerima PMN tsb utk menilai keberhasilan kinerja BUMN dan dievaluasi secara semesteran. Karena dengan adanya PMN ini, diharapkan growth bisnis yang dicapai harusnya menjadi lebih baik dan transparan

## HJ. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (24/02) — Anggota DPR RI Komisi VI mengingatkan kepada pemerintah pada saat Rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN agar melakukan perbaikan kinerja korporasi dibawahnya. Masalah menjadi Superholding BUMN atau Sub Holding BUMN jangan dijadikan bahan diskusi saja, tapi realisasinya.

Nevi juga mengingatkan bahwa Superholding BUMN itu bukan saja rencana menteri BUMN periode lalu, namun merupakan cita-cita lama agar Indonesia memiliki Perusahaan raksasa milik pemerintah untuk bersaing dengan dunia global di

masa datang. Super Holding BUMN ini telah terwacana untuk tujuan efisiensi dan lebih lincah dalam persaingan global.

"Saat ini Menteri BUMN lebih cenderung Sub Holding BUMN. Tidak masalah rencana ini dilakukan, yang penting ada realisasinya yang membawa perubahan lebih baik pada pengelolaan BUMN kita", tukas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, hingga saat ini, BUMN masih banyak yang memiliki ruh Birokrasi daripada ruh korporasi. Akibatnya perjuangan dalam mencapai keuntungan menjadi gangguang.

"Seharusnya BUMN ini

memiliki ruh korporasi, bukan ruh birokrasi. Bila ruh korporasi ini sepenuhnya diterapkan, keuntungan BUMN akan semakin membaik dan secara tidak langsung akan memberi kontribusi penerimaan negara yang lebih baik", katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Nevi, Setoran deviden BUMN pada tahun 2015 sebesar Rp 37,6 triliun, kemudian mencapai Rp 37,1 triliun di tahun 2016, dividen BUMN meningkat lagi menjadi Rp 43,9 triliun di tahun 2017 dan Rp 45,1 triliun di tahun 2018. Setoran dividen dari BUMN pada tahun 2019 diproyeksi akan mencapai Rp 49,61 triliun.

"Terhadap BUMN yang akan mendapatkan PMN, seharusnya agar dibuatkan KPI secara spesifik dan jelas setelah menerima PMN tsb utk menilai keberhasilan kinerja BUMN dan dievaluasi secara semesteran. Karena dengan adanya PMN ini, diharapkan growth bisnis yang dicapai harusnya menjadi lebih baik dan transparan", ucap Nevi.

Berdasarkan data APBN, lanjutnya, sepanjang 2015 sampai 2018, jumlah PMN yang



disalurkan pemerintah kepada BUMN mencapai Rp130,3 triliun. Sedangkan berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp17,7 triliun untuk BUMN

Fraksi kami, kata Nevi, sepakat untuk meminta agar BUMN bisa meningkatkan kinerjanya agar kontribusi deviden untuk negara lebih

maksimal. Pada tahun 2018 Pemerintah hanya mendapat setoran dividen dari BUMN sebesar Rp 44 triliun, padahal total aset BUMN di tahun yang sama sebesar Rp 8.200 triliun. Sebesar 80 % dari jumlah dividen tersebut hanya disumbang oleh 14 perusahaan, dari total 142 BUMN di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Jelang Ramadan dan Idul Fitri

# DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ketersediaan Bahan Pokok

"Jika stok barang tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bahan sembako yang tinggi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri, hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha akan menaikkan harga sesuai keinginannya sepihak

### **MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (24/02) — Kurang lebih dua bulan kedepan Umat Islam di dunia tak terkecuali Umat Islam di Indonesia akan menghadapi datangnya bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri.

Tentu sebagai muslim yang baik pasti akan merasa senang dan gembira dengan hadirnya bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Perasaan gembira umat Islam di bulan suci merambah ke seluruh aktivitas kehidupan. Bahkan, muncul perilaku muslim yang tidak seperti biasanya karena tingkat kegembiraan yang dirasakannya. Misalnya dalam urusan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Secara umum, tingkat konsumsi

masyarakat muslim di bulan puasa cenderung meningkat dibandingkan bulan lainnya.

Seolah telah menjadi fenomena tiap tahunnya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang masuknya bulan Ramadhan, apalagi di saat-saat mendekati hari raya Idul Fitri.

Walaupun tidak mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, tapi hal ini dijadikan kasus penting yang harus bias diantisipasi dan dijaga oleh pemerintah.

Hal tersebut seyogyanya dapat meningkatkan fokus pemerintah agar mampu menangani strategi pengamanan ketersediaan stok dan harga

bahan pokok di pasaran.

Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DAPII VI Jawa Barat, meminta kepada pemerintah harus bisa mengantisipasi ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga sembako jelang ramadhan dan hari raya idul fitri.

Mahfudz mengatakan ketersediaan stok barang kebutuhan masyarakat untuk momen Ramadhan dan Idul Fitri akan sangat berpengaruh pada harga jual.

"Jika stok barang tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bahan sembako yang tinggi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri, hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha akan menaikkan harga sesuai keinginannya sepihak", ungkapnya.

Sehingga kata Mahfudz, melonjaknya harga yang terjadi dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah.

"Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar



mampu memberikan jaminan kondisi ketersediaan bahan bahan kebutuhan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan sangat senang jika ditambah kondisi harga tetap terjaga sehingga tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat bias lebih khusus melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan," paparnya.

Mahfudz pun menegaskan, kehadiran pemerintah dalam penanganan masalah pasokan bahan sembako guna

kebutuhan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan menjaga stabilitas harga menjadi bukti bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat secara keseluruhan.

"Sehingga selama bulan puasa dan lebaran masyarakat tidak terbebani dengan naiknya harga bahan-bahan pokok di pasaran, dan tidak mungkin akan memicu kepanikan dan terjadi keriuhan disana sini", tutup Mahfudz.

Foto : dpr.go.id

# PKS Desak PLN dan PGN Sinergi untuk Produksi Listrik Murah

Ini merupakan langkah sangat strategis, karena akan mengurangi defisit transaksi perdagangan migas, menghemat devisa untuk pembayaran impor dan sekaligus akan merelaksasi kondisi keuangan PLN. Dan ujungnya masyarakat diuntungkan dengan harga listrik yang murah, alias tidak naik.

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (24/02) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mendesak PLN bersinergi dengan PGN untuk membangun infrastruktur dan menyediakan pasokan LNG di 52 pembangkit listrik PLN, yang selama ini menggunakan energi fosil yang diimpor.

Hal tersebut perlu dilakukan agar PLN dapat menghemat biaya produksi listrik sebesar Rp 1,9 triliun pertahun sehingga harga listrik, terutama bagi golongan pelanggan rumah tangga tidak mampu 900 voltampere (VA), bisa jadi lebih murah.

Mulyanto, yang anggota Komisi VII DPR RI, menilai kerjasama PLN dengan PGN saat ini kurang maksimal. Masing-masing BUMN energi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak tercipta sinergi yang menguntungkan bagi masyarakat.

Harusnya, kata Mulyanto, kerjasama PLN dan PGN dalam hal pembangunan infrastruktur dan penyediaan pasokan LNG sebagai bahan baku produksi listrik PLN dilakukan sejak lama. Mengingat harga LNG sangat murah dan lebih ramah lingkungan.

"Ini merupakan langkah

sangat strategis, karena akan mengurangi defisit transaksi perdagangan migas, menghemat devisa untuk pembayaran impor dan sekaligus akan merelaksasi kondisi keuangan PLN. Dan ujungnya masyarakat diuntungkan dengan harga listrik yang murah, alias tidak naik.

Karena itu pemerintah harus menjaga program ini secara konsisten. Bahkan program ini harus terus diperluas dan dikembangkan untuk titik-titik pembangkit PLN lain yang masih menggunakan bahan bakar fosil," ujar Mulyanto di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).

Mulyanto menambahkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut PLN harus proaktif membuka komunikasi dengan pihak PGN dan Kementerian ESDM. PLN harus berperan sebagai pihak paling berkepentingan terciptanya infrastruktur jaringan gas ini.

"Dengan program ini, maka upaya mewujudkan listrik murah bagi rakyat menjadi sangat mungkin terlaksana," tegas Mulyanto.

Foto : dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

*Pro kontra RUU Ketahanan Keluarga*

## ***Hancurnya Moral Bangsa Diawali Rusaknya Keluarga***

*Hancurnya moral Bangsa ini diawali dari Rusaknya  
Tatanan Keluarga, maka coba kita lihat secara terminologi  
agama, disitu dikatakan bahwa jangan lah mendekati  
zina, artinya kita harus punya langkah preventif*

**H. Iskan Qolba Lubis, M.A.**

*Anggota Komisi VIII DPR RI*

Pro kontra RUU Ketahanan Keluarga,

# Iskan: Hancurnya Moral Bangsa Diawali Rusaknya Keluarga

Hancurnya moral Bangsa ini diawali dari Rusaknya Tataan Keluarga, maka coba kita lihat secara terminologi agama, disitu dikatakan bahwa jangan lah mendekati zina, artinya kita harus punya langkah preventif

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (27/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam pemaparannya tentang pro kontra RUU Ketahanan Keluarga, beliau menyampaikan bahwa Keluarga sebagai institusi terkecil di negara ini, dibuktikan dengan adanya kartu keluarga. Maka dari itu harus dimaksimalkan perannya.

"Ini belum apa-apa, pada menolak. Lihat saja judul usulan itu, "Ketahanan Keluarga", jadi tidak serta merta disini semua permasalahan kriminal didalam rumah tangga, justru dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga ini nantinya akan

membuat Indonesia lebih baik kedepannya", ungkapnya.

Seperti diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu, Setidaknya ada lima anggota dewan yang menginisiasi RUU ini : Sodik Mudhajid dari Fraksi Partai Gerindra, Netty Prasetyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, serta Ali Taher dari Fraksi PAN.

"RUU ini merupakan RUU prolegnas tahun ini, saya ingin masyarakat jangan apriori dulu, kita lihat nanti riak pembahasannya, pada prinsipnya RUU ini bagus, apalagi kita ini kan menganut adat ketimuran, bukan keluarga

bebas seperti di Eropa, mereka menikah itu hanya sekedar ikatan saja, beda dengan kita yang berasas Pancasila, dimana sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Jadi, aspek agama tidak boleh kita abaikan begitu saja," tegas Iskan.

Selain itu, kata Iskan, banyaknya praktik kenakalan remaja, seks bebas, peredaran narkotika dikalangan anak anak dibawah umur itu juga pasti ada penyebabnya, maka RUU ini mudah2an bisa menjadi salah satu alternatif solusi.

"Hancurnya moral Bangsa ini diawali dari Rusaknya Tataan Keluarga, maka coba kita lihat secara terminologi agama, disitu dikatakan bahwa jangan lah mendekati zina, artinya kita harus punya langkah preventif," tegas Iskan.

"Di situ ada proses, pemikiran, dan kesempatan dalam terciptanya perbuatan yang tidak kita inginkan, sehingga perlu adanya RUU Ketahanan Keluarga ini," tutup Iskan.



# Komisi IX Dorong Kemenkes-Polri Tuntaskan Kasus Aborsi Paseban

Kita kawal juga Polri untuk proses hukumnya, kita percayakan pada penegak hukum Pihak Kepolisian menjelaskan dalam penyelidikan tidak ada hambatan. Nanti, kita tunggu hasil dari Kepolisian. Namun, Komisi IX DPR RI juga akan memanggil Kapolri Idham Azis atau Kapolda untuk menjelaskan kenapa bisa sampai terjadi kasus ini di pusat kota Jakarta Pusat

## H. ANSORY SIREGAR, Lc

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku Pimpinan Tim Kunlap Komisi IX DPR RI mendorong seluruh jajaran stakeholder terkait seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk menuntaskan permasalahan praktik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat. Sebab, menurut Ansory, praktik aborsi ilegal di Paseban sudah merupakan kejadian yang hampir selalu berulang.

Sehingga, dapat dikategorikan menjadi kejadian yang

sangat luar biasa melampaui kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Tercatat, dalam jangka waktu 21 bulan atau belum mencapai 2 tahun sudah terjadi praktik aborsi ilegal kurang lebih 903 janin yang menjadi korban. Demikian dipaparkan Ansory Siregar saat diwawancara Rai Parlemataria serta awak media usai memimpin Tim Kunlap Komisi IX DPR RI meninjau lokasi yang dijadikan praktik aborsi ilegal, di Paseban, Senen Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

"Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan lapangan RI ke Paseban karena

terjadi aborsi kurang lebih 903 janin. Jadi, yang perlu kita lihat bahwa ini kejadian yang berulang. Tapi, kejadian sudah sangat-sangat luar biasa. Dalam jangka 21 bulan, tidak ada 2 tahun pastinya, terjadi kurang lebih 903 kejadian. Jadi, nanti baik dari Kemenkes maupun Dinkes DKI Jakarta kita sama-sama dorong menuntaskan permasalahan ini," tegas Ansory.

Di sisi lain, dari segi penegakan hukum, Ansory menegaskan Komisi IX DPR RI mempercayakan seluruh proses hukumnya berkaitan dengan praktik aborsi ilegal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun demikian, Ansory mengungkapkan tidak menutup kemungkinan untuk juga memanggil Kapolri Idham Azis atau Kapolda Metro Jaya untuk menjelaskan secara lebih mendetail kasus praktik aborsi ilegal di Paseban tersebut.

"Kita kawal juga Polri untuk proses hukumnya, kita percayakan pada penegak hukum. Pihak Kepolisian menjelaskan dalam penyelidikan tidak ada hambatan. Nanti, kita tunggu hasil dari Kepolisian. Namun, Komisi IX DPR RI juga



akan memanggil Kapolri Idham Azis atau Kapolda untuk menjelaskan kenapa bisa sampai terjadi kasus ini di pusat kota Jakarta Pusat," tandas Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Lebih lanjut, Ansory mengapresiasi Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan beserta jajaran dalam upaya terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan berkaitan praktik aborsi ilegal di Paseban itu. "Kombes Iwan

Kurniawan menyebutkan bahwa sudah ada satu dokter yang ditahan. Kemudian, tiga bidan yang sudah ditahan serta masih ada pelaku-pelaku lainnya kurang lebih mencapai puluhan. Kemudian, juga dokter yang buron satu sedang dalam pengejaran. Ini masih dalam penyidikan penyelidikan kita percayakan. Nanti, kita di DPR kita akan panggil juga Menteri terkait serta kita panggil juga Gubernurnya," pungkas legislator dapi Sumatera Utara III tersebut. (pun/sf)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## ***PKS Dorong Industri Kreatif Bangun Karakter Bangsa***

*Industri kreatif memiliki potensi yang luar biasa, namun demikian tetap harus memperkuat karakter bangsa. Hingga pada akhirnya modernitas menjadi peluang yang mampu memberi manfaat luar biasa bagi pembangunan masyarakat*

***Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed***

*Anggota Komisi X DPR RI*

# PKS Dorong Industri Kreatif Bangun Karakter Bangsa

Industri kreatif memiliki potensi yang luar biasa, namun demikian tetap harus memperkuat karakter bangsa. Hingga pada akhirnya modernitas menjadi peluang yang mampu memberi manfaat luar biasa bagi pembangunan masyarakat

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed.**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (26/2) Anggota DPR RI Komisi X Fahmy Alaydroes menyampaikan pesan dan catatan agar Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi dan Animasi memproduksi film atau animasi yang bermuatan pesan positif dalam membentuk karakter akhlak mulia, karakter bela negara, karakter kerjasama, dan kepeulian terhadap sesama

"Produk-produk digital ini sangat relevan sekaligus urgent untuk kita anak-anak,

generasi milineal, generasi alpha dan yang akan datang ditengah terpaan dan gelombang pengaruh negatif dari dunia digital" disampaikan Fahmy Alaydroes saat konsinyering bersama para Ketua Deputy dan Direktur di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Fahmy berharap target ekonomi kreatif bukan hanya melulu soal keberhasilan material, tapi juga harusnya ada target yg bersifat moral.

Industri kreatif memiliki potensi yang luar biasa, namun demikian tetap harus memperkuat karakter bangsa. Hingga pada akhirnya modernitas menjadi peluang yang mampu memberi manfaat luar biasa bagi pembangunan masyarakat.\*

"Kepala Deputi Joshua Puji Mulia sangat mendukung dan berjanji akan menindak-lanjutinya." tegasnya.



# Sakinah Aljufri Dukung Penuh Upaya IAIN Palu Alih Status Jadi UIN

“Kita juga berharap dengan alih status menjadi UIN akan memberikan peluang besar bagi warga kampus untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam di Palu. Selain itu, kami juga berharap nantinya kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, harus lebih maju dari sekarang

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Palu (24/02) — Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi X dapil Sulawesi Tengah mendukung penuh upaya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu untuk meningkatkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palu. Dukungan tersebut disampaikan di sela-sela Kunjungan Kerja Panja PON ke Papua, Jumat, (21/02/2020).

“Kita semua mendukung penuh rencana alih status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri Palu,” ungkap politikus PKS dapil Sulawesi Tengah.

IAIN Palu merupakan salah satu Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama, yang memiliki peluang sangat besar untuk bertransformasi menjadi UIN.

“Kita juga berharap dengan alih status menjadi UIN akan memberikan peluang besar bagi warga kampus untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam di Palu. Selain itu, kami juga berharap nantinya kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, harus lebih maju dari sekarang,” ucap Anggota Dewan Komisi X yang membidangi pendidikan.

Sebelumnya Kementerian

Agama melakukan moratorium sementara alih status IAIN menjadi UIN yang diberlakukan kepada seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia, sejak 2017.

Dengan alih status menjadi UIN Sakinah berharap agar program studi keagamaan tetap diwujudkan.

“Pesan saya setelah alih status menjadi UIN agar program studi keagamaan agar terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, jangan sampai kalah dengan program studi umum,” pungkas Sakinah.



## Buntut Musibah Susur Sungai

# Fikri Faqih Tolak Wacana Hapus Ekskul Pramuka di Sekolah

“Dalam teori kebencanaan hanya ada 2 hal yg bisa kita lakukan terhadap daerah yang dekat atau berpotensi bencana yakni: mitigasi dan adaptasi, kita berharap siswa juga semakin adaptif terhadap potensi bencana melalui Pramuka

### Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (26/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menolak tegas wacana penghapusan kegiatan ekstra kurikuler Pramuka di sekolah menyusul insiden susur sungai di SMPN 1 Turi, Kabupaten Sleman, Di Jogjakarta.

“Berlebihan bila karena satu kasus ini menjadi kesalahan Ekskul Pramuka, justru kita harus tingkatkan perhatian dan meminta Kwartir Nasional Pramuka untuk intensif turun membina anggotanya,” kata politisi PKS ini, Selasa (25/2).

Menurut Fikri, kegiatan luar sekolah Pramuka bagi siswa sangat bermanfaat dan bernuansa positif bagi

permbentukan karakter mereka. “Ada tujuan mulia di balik siswa ikut Pramuka dan saya kira hal ini dilindungi oleh konstitusi kita,” imbuhnya.

Dia menambahkan, salah satu tujuan Pendidikan kepramukaan di sekolah menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, adalah sebagai wadah pengembangan potensi diri agar memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara.

Di samping itu, pendidikan kepramukaan merupakan wadah pemenuhan hak warga

negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih jauh, Fikri meminta Kwartir Nasional Pramuka melakukan kemitraan program kegiatan luar ruangan dengan instansi penanggulangan bencana seperti BNPB atau BPPD agar kejadian musibah seperti di SMPN 1 Turi tidak terulang.

“Para pembina pramuka di situ seperti tak paham kapan bisa memanfaatkan kegiatan susur sungai dan kapan saat sungai itu kita hindari karena berbahaya, padahal ini bagian dari materi mitigasi bencana,” urai Fikri.

Kejadian tersebut dapat menjadi evaluasi bagi semua pihak, baik sekolah, gerakan pramuka, maupun pemerintah daerah agar dapat mensinergikan program mitigasi bencana yang melibatkan siswa di tiap jenjang pendidikan.

“Dari musibah tersebut, ada pertanda bahwa lembaga



pendidikan kita tidak akrab dengan lingkungan sekitar dan kurang memahami karakteristik alamnya,” tambah dia.

Selain mitigasi bencana, Fikri menilai perlunya sekolah dilibatkan dalam aktifitas kesiagaan bencana, terutama yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

“Dalam teori kebencanaan hanya ada 2 hal yg bisa kita lakukan terhadap daerah yang dekat atau berpotensi bencana yakni: mitigasi dan adaptasi, kita berharap siswa juga semakin adaptif terhadap potensi bencana melalui Pramuka,”

tutup dia.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan perlunya Pramuka dievaluasi sebagai Ekskul wajib di sekolah.

Hal itu diusulkan terkait musibah kegiatan pramuka SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Jogjakarta yang menyebabkan 10 siswa meninggal terseret air bah, dan 23 siswa lainnya luka luka. Terseretnya para siswa yang tengah mengikuti kegiatan susur sungai tersebut disinyalir karena tidak mengindahkan cuaca yang tengah hujan lebat di hulu.

# Ledia Hanifa Minta Pemerintah Bersikap Adil dalam PPDB

Sepanjang memenuhi aturan yang berlaku tentu tidak ada masalah. Tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran maka mereka merasa dirugikan, padahal mereka adalah mitra Kementerian dalam menyelenggarakan pendidikan, tetapi merasa dianaktirikan. Karenanya mereka mengadu meminta keadilan dalam proses PPDB ini,"

## Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (26/02) — Masa Penerimaan Peserta Didik Baru akan segera dimulai. Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan Pemerintah agar mempersiapkan PPDB dengan tepat dan sesuai ketentuan termasuk ketentuan soal rombongan belajar dan kapasitas siswa.

Mengapa hal ini menjadi perhatian, kata Ledia, karena ada keluhan dan masukan dari perwakilan sekolah-sekolah swasta yang merasakan mendapat ketidakadilan.

Ledia menuturkan, dalam kunjungan kerja ke dapilnya

Kota Bandung-Kota Cimahi beberapa waktu lalu dirinya sempat mendapatkan aspirasi dari Perwakilan Musyawarah Guru SMP di Kota Cimahi.

"Sudah beberapa waktu terakhir wakil sekolah swasta mengaku tidak lagi dilibatkan dalam uji publik bahkan tak lagi mendapat dokumen juklak juknis resmi terkait PPDB. Sehingga mereka juga tidak mengetahui kalau ada perubahan-perubahan bahkan tidak bisa menggugat saat terjadi pelanggaran karena tidak punya dokumen." pungkas Ledia.

Pelanggaran yang

dimaksud, ujar Ledia, diantaranya adalah pelanggaran jumlah rombel dan kapasitas siswa. Dari idealnya maksimal 9 rombel dan 32 siswa, banyak sekolah negeri yang masih membuka kelas hingga 12 rombel dengan kapasitas siswa mencapai 36 siswa per kelas.

Menurut Ledia para pendidik di sekolah swasta ini mengadu karena persoalan jumlah kelas dan murid bagi sekolah swasta menjadi satu komponen yang krusial bagi guru juga sekolah.

"Misalnya saja soal honor bagi para guru honorer, terutama para pemegang sertifikasi, akan terhambat bila jumlah jam mengajar tak terpenuhi. Jumlah jam mengajar ini akan dipengaruhi jumlah kelas. Sementara jumlah kelas ini sangat tergantung pada jumlah siswa," terang Anggota DPR dari Jawa Barat 1 ini.

Begitu juga terkait pendirian sekolah negeri baru yang belum memiliki sarana prasarana cukup sesuai peraturan namun bisa dengan mudah mendapat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSPN), satu hal yang sangat sulit didapat



oleh sekolah swasta. Padahal banyak diantara sekolah swasta ini yang berdiri sebelum sekolah negeri baru tersebut hadir di wilayah tersebut namun belum bisa mendapatkan NSPN.

Meski demikian, lanjut adeg dari Fraksi PKS ini, para pendidik yang mewakili berbagai sekolah swasta ini tidak berkeberatan dengan program pemerintah terkait pendirian sekolah baru.

"Sepanjang memenuhi

aturan yang berlaku tentu tidak ada masalah. Tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran maka mereka merasa dirugikan, padahal mereka adalah mitra Kementerian dalam menyelenggarakan pendidikan, tetapi merasa dianaktirikan. Karenanya mereka mengadu meminta keadilan dalam proses PPDB ini," tutup Ledia.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## **Anggota DPR FPKS Nilai Pemerintah Tak Perlu Revisi APBN 2020**

*Konsumsi merupakan pendorong terbesar perekonomian Indonesia. Tetapi selama ini pemerintah masih belum serius dalam mendorong konsumsi. Dengan adanya kondisi ini, makanya pemerintah harus bisa fokus dan bertumpu pada kekuatan domestik,*

**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.**  
Anggota Komisi XI DPR RI

# Anggota DPR FPKS Nilai Pemerintah Tak Perlu Revisi APBN 2020

Konsumsi merupakan pendorong terbesar perekonomian Indonesia. Tetapi selama ini pemerintah masih belum serius dalam mendorong konsumsi. Dengan adanya kondisi ini, maknanya pemerintah harus bisa fokus dan bertumpu pada kekuatan domestik,"

## Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (27/02) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap bahwa pemerintah tidak perlu melakukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 meski perekonomian global dan domestik terancam oleh wabah virus corona.

Menurut Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, hal ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang tidak bertumpu pada kegiatan ekspor dan impor, tetapi lebih kepada perekonomian domestik.

Oleh karenanya, urgensi pemerintah saat ini adalah

memperkuat perekonomian domestik, terutama dari sisi konsumsi daripada melakukan revisi APBN 2020.

"Konsumsi merupakan pendorong terbesar perekonomian Indonesia. Tetapi selama ini pemerintah masih belum serius dalam mendorong konsumsi. Dengan adanya kondisi ini, maknanya pemerintah harus bisa fokus dan bertumpu pada kekuatan domestik," kata Anis kepada Kontan.co.id, Rabu (26/2).

Anis pun menjabarkan ada beberapa hal yang membuat pemerintah harus merevisi APBN. Pertama, tenggat waktu proses pelaksanaan anggaran

dan perencanaan anggaran yang sangat lama sehingga memungkinkan untuk tidak mengcover perubahan di tahun depannya.

Kedua, adanya perubahan metodologi pelaksana kegiatan, dan ketiga adanya perubahan kebijakan pemerintah seperti pemerintah memutuskan untuk menghemat anggaran, serta yang keempat saat periode berjalan ada keadaan tiba-tiba yang mengganggu perekonomian.

Anis juga tak memungkiri bahwa alasan keempat sangat dekat dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu adanya wabah virus corona. Namun, ia tetap kekeh bahwa ini belum cukup kuat untuk menjadi alasan pemerintah dalam melakukan revisi APBN karena perekonomian memiliki alternatif untuk bergantung pada sektor domestik. "Maknanya tidak disarankan," tegasnya.

Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda konsumsi, Anis mengimbau agar pemerintah bisa lebih memperhatikan harga-harga, terutama harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), seperti



contohnya iuran BPJS, tarif listrik, dan harga gas subsidi.

Ia pun juga menyayangkan dengan adanya kenaikan iuran BPJS untuk kelas 3. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu alasan penurunan daya beli sehingga bisa berpotensi menghambat konsumsi.

Selain itu, Anis juga mengimbau agar pemerintah bisa mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

dan produksi dalam negeri sehingga barang-barang keperluan masyarakat tidak melulu harus impor.

"Ini akan merumoda ekonomi dengan baik.

Konsumen bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau, pedagang dalam negeri juga untung, proyek juga untung," tandasnya.

Foto : dpr.go.id

# MKD DPR RI Semakin Dipercaya Masyarakat

Perlu kerja besar, artinya kita harus menciptakan hasil kinerja yang lebih baik, bukti kontrol kita kepada pemerintah harus lebih maksimal. Di samping juga budgeting APBN yang harus tersentuh kepada masyarakat. Bukti amanah parlemen harus kelihatan oleh masyarakat, bukan hanya janji-janji

## Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI

Banyaknya pengaduan masyarakat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI merupakan bukti tersosialisasikannya tugas dan fungsi lembaga ini di tengah masyarakat. Ini menunjukkan MKD DPR RI semakin dipercaya oleh masyarakat, karena dijadikannya lembaga ini tempat untuk mengadu terkait masalah yang ada di parlemen.

"Tentunya menurut saya, semakin banyaknya pengaduan dari masyarakat harus diimbangi juga dengan kondisi

internal yang memadai. Alhamdulillah telah terwadahi dengan terbitnya peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di MKD," kata Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional "Arah Baru Kebijakan MKD, Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah" di Jakarta, Senin (24/2/2020).

la melanjutkan, dengan peraturan tersebut, MKD memiliki peran baru dari untuk pencegahan Anggota DPR RI dalam masalah kasus hukum. "Kita masuk lebih dahulu dan memberikan masukan kepada anggota tersangkut hukum sebagai pintu pertama untuk dialog. Ini adalah peninggalan yang luar biasa dari periode sebelumnya, sebagai pondasi Tata Beracara MKD. Namun, secara detail aturan dari Baleg belum turun ke kita, nanti akan dipelajari bagaimana amanahnya," tuturnya.

MKD DPR RI sebagai lembaga perwakilan, akan dihadapkan pada berbagai tugas pokok dan fungsi yang semakin besar dan dinamis semakin tinggi. Tentunya diperlukan evaluasi dan



Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional "Arah Baru Kebijakan MKD, Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah" di Jakarta, Senin (24/2/2020). (Foto : Jaka/Man/dpr.go.id )

perbaikan atas capaian yang sudah ada, hal ini adalah upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Oleh karena itu, MKD bermaksud mematangkan visi dan misi serta mendefinisikan arah baru kebijakan yang sesuai dengan paradigma etika kelembagaan perwakilan. Melalui kegiatan seminar ini, kami berharap akan mendapatkan masukan dan

telah untuk menguatkan kelembagaan, terkait fungsi dan peran MKD sebagai penegak etik di DPR RI," pungkasnya.

Aboe menyatakan, pembentukan lembaga MKD ini mempunyai spirit tunggal, yaitu sebagai bentuk kehormatan yang harus dijaga, serta mengedepankan kehormatan dan keluhuran DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tentu tugas ini cukup berat,

butuh ketekunan dan kesungguhan.

"Perlu kerja besar, artinya kita harus menciptakan hasil kinerja yang lebih baik, bukti kontrol kita kepada pemerintah harus lebih maksimal. Di samping juga budgeting APBN yang harus tersentuh kepada masyarakat. Bukti amanah parlemen harus kelihatan oleh masyarakat, bukan hanya janji-janji," tutupnya. (jk/es)

# Bekasi, Karawang, dan Purwakarta diharapkan Tetap Jadi Lumbung Padi Nasional

Sejak saya dilantik menjadi Wakil Rakyat di DPR, saya kerap bertemu dengan masyarakat. Tak cuma saat reses. Dari sinilah banyak aspirasi yang masuk terkait soal hasil panen padi

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Barat

Jakarta (24/02) — Adanya pelambatan hasil produksi padi di Kabupaten Karawang dan wilayah sekitarnya mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Ahmad Syaikh. Politisi PKS itu pun memberikan 8 langkah untuk mengatasi hal ini.

Syaikh yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu menjelaskan, langkah-langkah dimaksud setelah dirinya insentif bertemu dengan masyarakat di dapilnya.

"Sejak saya dilantik menjadi Wakil Rakyat di DPR, saya kerap bertemu dengan masyarakat. Tak cuma saat reses. Dari sinilah banyak aspirasi yang masuk terkait soal hasil panen padi," ujar Syaikh. Ada dua aspirasi yang

mengemuka yakni perlunya dukungan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Seperti diketahui, Dapil Jabar VII adalah kawasan pertanian yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Hal itu karena luasnya lahan pertanian yang ada dan tingginya angka produktifitas hasil panen.

Menurut Syaikh, kebijakan pada era terdahulu yang menyediakan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya, membuat produktifitas hasil pertanian meningkat. Sehingga dikenal sebagai lumbung padi nasional.

Namun sayangnya, dua tahun terakhir, ada tren pelambatan angka produksi.

Menurut data dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta tahun 2019, peningkatan produktivitas padi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat sedikit. Dari luas panen 310.344 hektar, pada tahun 2017 dihasilkan 2,22 Juta Ton GKP pada tahun 2018 bertambah menjadi 2,37 juta Ton GKP. Bahkan di Kabupaten Bekasi sudah mengalami penurunan. Dari luas panen 97.577 hektar, pada tahun 2017 bisa menghasilkan 611.386 Ton GKP. Tetapi tahun 2018 hanya bisa menghasilkan 573.928 Ton GKP.

"Tren pelambatan ini sangat mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi," kata Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat setidaknya ada tiga penyebabnya.

Pertama, sejalan dengan pertumbuhan industrialisasi dan perumahan, terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian produktif untuk dijadikan kawasan industri dan perumahan. Disamping itu kondisi infrastruktur pertanian masih banyak yang rusak atau tidak terpelihara



dengan baik. Bahkan tidak terjadi penambahan infrastruktur pertanian yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, kondisi infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Karawang. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang Tahun

2019, menunjukkan bahwa Infrastruktur saluran irigasi baik sekunder maupun tersier yang masih baik hanya 1.025 KM dari 2.242 KM atau 45,72% saja. Sedangkan 475 KM (21,19 % ) rusak sedang dan 769 ( 34,30 % ) rusak berat.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Nasir Djamil Terima Aduan Mantan Dokter dan Bidan PTT Aceh Timur

Saya akan coba memfasilitasi dan akan menemui langsung para mantan dokter dan bidan PTT tersebut sekaligus mengumpulkan informasi tambahan

**H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.**

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil menerima aduan dari mantan Dokter dan Bidan PTT asal Aceh Timur terkait belum dibayarkan hak mereka selama 10 bulan pasca pergantian status mereka dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Aduan tersebut disampaikan oleh Indonesia Crisis Center (ICC) selaku wakil dari para dokter dan bidan PTT di Ruang Kerja Nasir Djamil di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta pada Kamis (20/02/2020)

Menurut ICC Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur

tidak memenuhi hak para mantan dokter dan bidan PTT dengan dalih pencairan

dana anggaran untuk gaji mantan dokter dan bidan PTT tersebut tidak ada payung hukumnya.

Permasalahan muncul saat pemutusan status PTT dan peralihan ke status CPNS, mata anggaran yang awalnya berasal dari pusat telah beralih ke daerah karena status mereka sudah menjadi CPNS Daerah.

"Pasca ditetapkan sebagai CPNS, sejak maret hingga desember 2017 para dokter dan bidan PTT tidak menerima hak mereka" Sebut juber ICC, Rahmad

la menambahkan BPK

telah melakukan audit anggaran Dana Alokasi Khusus (DAU) 2017 dan terdapat alokasi dana untuk pemberian gaji mantan Dokter dan Bidan PTT tersebut dengan total 23 Milyar.

"1Triliun 43 Milyar total dana DAU, ada 23 Milyar dana yang telah dialokasikan untuk menggaji mereka (red: mantan dokter dan Bidan PTT). Kementan sudah mengirim surat ke Pemda tapi belum juga ada pembayaran" Tambah Rahmad

Menanggapi hal tersebut, Nasir Djamil menyampaikan komitmen untuk memediasi persoalan ini guna mencari jalan keluar yang tepat dan



cepat.

"Saya akan coba memfasilitasi dan akan menemui langsung para mantan dokter dan bidan PTT tersebut sekaligus mengumpulkan informasi tambahan" ujar Nasir.

Politisi PKS Ini berharap nantinya ada jalan keluar yang bisa dilakukan dan para

mantan dokter dan bidan PTT Aceh timur ini dapat segera menerima hak mereka yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

"Mudah-mudahan setelah kunjungan ke Aceh Timur nanti ada Solusi yang didapat. Dan solusi tersebut sesuai dengan harapan para mantan dokter dan bidan PTT". Tutup Nasir.

# Anggota Fraksi PKS DPR RI Bantu Korban Banjir di Kabupaten Garut

Masyarakat yang wilayahnya punya resiko terdampak bencana seharusnya langsung diberi pelatihan mitigasi oleh pemerintah bekerjasama dengan TNI setempat

## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

Garut (25/02) — Keadaan cuaca yang ekstrem di wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat, menjadi perhatian serius anggota komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke dapilnya toriq mendapatkan informasi dari Dewan Pengurus cabang PKS kecamatan Cibatu bahwa konsituennya mendapat musibah akibat cuaca ekstrem.

"Seorang konsituen kami terdampak bencana akibat hujan lebat dan angin kencang," ujar Toriq.

Ibu Tati seorang janda beranak tujuh ini, rumahnya roboh di kampung Babakan Desa Sindangsuka Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.

Toriq menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah yang terjadi. Bersama struktur DPD PKS Kabupaten Garut, Toriq menyerahkan bantuan pada keluarga yang rumahnya roboh akibat hujan lebat.

"Kami mendoakan agar bu Tati kuat dan bersabar menghadapi musibah ini," doa Toriq. Dengan bantuan yang diberikan PKS diharapkan rumah ibu Tati dapat segera diperbaiki.

"Dalam kondisi cuaca ekstrem saat ini diharapkan masyarakat lebih waspada dan mengikuti setiap himbauan dari pemerintah setempat", tambah Toriq.

BMKG telah membuat informasi terkait kemungkinan

kemungkinan terjadinya cuaca buruk, namun informasi tersebut tidaklah cukup. Perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana yang tersosialisasi dengan baik.

"Masyarakat yang wilayahnya punya resiko terdampak bencana seharusnya langsung diberi pelatihan mitigasi oleh pemerintah setempat bekerjasama dengan TNI setempat", tegas toriq.

"Untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa", tambah Toriq.

Toriq juga mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatiannya kepada para korban bukan hanya pada saat bencana tetapi pasca bencana sampai masa pemulihan di daerah terdampak bencana.

"Mari bersama-sama kita hadapi musibah ini dengan bertawakal kepada Allah dan saling tolong menolong sesama anak bangsa", tutup Toriq.



# Kunjungi Warga Terdampak Banjir, Anis Byarwati Beri Sejumlah Bantuan

Penyerahan bantuan diberikan kepada ketua Yayasan Raudatul Jannah Bapak Muharram disaksikan oleh puluhan warga Gang Arus yang memang menjadi langganan banjir karena berada di bantaran sungai Ciliwung

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.**

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Jakarta (29/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, (27/02/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Anis juga sekaligus menyerahkan bantuan berupa makanan, cairan desinfektan, alat-alat kebersihan dan lain-lain.

"Penyerahan bantuan diberikan kepada ketua Yayasan Raudatul Jannah Bapak Muharram disaksikan oleh puluhan warga Gang Arus yang memang menjadi langganan

banjir karena berada di bantaran sungai Ciliwung", ungkap Anis.

Tidak hanya memberikan bantuan berbagai kebutuhan, Anis juga melakukan dialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat sekitar terdampak banjir.

Dalam dialog salah seorang pengurus RW 07 Kelurahan Cililitan menyampaikan beberapa permasalahan warga RW 07 terkait banjir di wilayahnya.

"RW 07 ini merupakan daerah rawan banjir, karena berlokasi di tepian sungai

Ciliwung. Saat ini kami sangat membutuhkan pompa air untuk menguras sisa-sisa genangan banjir di pemukiman warga", ungkap ketua RW 07.

Pada kunjungan berikutnya, Anis Byarwati juga menyapa warga dan Ketua RW 013, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara.

Bertempat di Kantor RW yang beralih fungsi sementara sebagai pengungsian korban banjir, Anis berdiskusi dengan ketua RW dan beberapa warga tentang kondisi para pengungsi dan bencana banjir yang melanda RW 013.





DAPIL

## Beri Bantuan Warga Terdampak Banjir,

Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, (27/02/2020). Dalam kunjungan tersebut, Anis juga sekaligus menyerahkan bantuan berupa makanan, cairan desinfektan, alat-alat kebersihan dan lain-lain.



MKD

## Seminar MKD DPR RI

Ketua MKD DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy memberikan sambutan dalam Seminar Nasional MKD DPR RI "Arah Baru Kebijakan MKD DPR RI Periode 2020-2024: Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah", di Meeting Room Crown Plaza, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.

"Semakin banyaknya pengaduan dari masyarakat harus diimbangi juga dengan kondisi internal yang memadai. Alhamdulillah telah terwadahi dengan terbitnya peraturan DPR RI No. 2/2015 tentang Tata Beracara di MKD," kata Habib Aboe



DPP PKS

## Kunjungi DPP Golkar

Jakarta (25/02)- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini bersama Presiden PKS Sohibus Iman beserta jajaran pengurus DPP PKS diterima langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/2) malam. Hadir pula dalam kunjungan ini Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal, Bendahara Mahfudz Abdurrahman, Ketua TPP Pusat Chairul Anwar, Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Muzzammil Yusuf, Pimpinan FPKS DPR RI dan pimpinan lainnya.



KOMISI IX

## Kunjungi PT Indosat

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar dan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati bersama tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke PT. Indosat Ooredoo Jakarta pada Kamis (27/2). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pengurus Serikat Pekerja PT. Indosat Ooredoo membahas terkait PHK massal yang dilakukan perusahaan kepada sejumlah karyawan pada Selasa (25/2/2020) lalu.

KOMISI IX

## Kunjungi LKBN Antara

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar dan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati bersama Tim Komisi IX DPR melakukan kunjungan lapangan ke Lembaga Kantor Berita Antara, Jakarta Pusat. Kamis pagi (27/2) Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan serikat pekerja Antara beberapa waktu lalu, yang membahas perihal kesejahteraan karyawan.

KOMISI X

## RDP dengan Gubernur dan Ketua DPRD DKI

Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M.,M.Ed. hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Kamis, 27 Februari 2020. #Komisi10

Foto/News. dpr.go.id



## Menerima Kunjungan BMOIWI

Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani menerima kunjungan dari Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) pada Rabu 26 Februari 2020 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Pertemuan ini mengagendakan sharing dan diskusi terkait dengan RUU Keta-hanan Keluarga yang saat ini sedang dibahas DPR.

## Aspirasi Forum Honorer Indonesia Aspirasi

Anggota Komisi II DPR RI Teedy Setiadi menerima kunjungan dari Forum honorer Indonesia pada Selasa 25 Februari 2020 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi terkait Nasib honorer dan permohonan revisi terbatas UU ASN.

## Menerima Kunjungan SMPIT Khalifa Tangsel

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA menerima kunjungan dari Siswa-siswi SMPIT Khalifa Kota Tangsel, pada Rabu 26 Februari 2020 di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lt 1. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

## PROFIL

## Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM



**K**epada seluruh rekan dan sahabat KeluargaPKS, pekan ini kita akan berenal dengan seorang sosok yang bersahaja dan sederhana.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM lahir di Tegal, Jawa Tengah, 17 Juli 1963. Saat ini menjabat sebagai Anggota DPR mewakili daerah pemilihan "Republik Ngapak" Tegal dan Brebes. Sebelumnya, beliau merupakan anggota DPRD Jawa Tengah dua periode sejak 2004.

Sebagai putra seorang kiyai, Pak Fikri dibesarkan di bawah pengaruh pondok pesantren. Namun, beliau menempuh pendidikan formal di sekolah

negeri. Selepas tamat dari IKIP Negeri Semarang yang kini bernama Universitas Negeri Semarang (UNES) sebagai sarjana pendidikan teknik elektro pada 1986, Pak Fikri bekerja sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengalaman mengajarnya di beberapa sekolah di Tegal membuatnya dinobatkan sebagai salah seorang guru teladan se-Kota Tegal pada 1988. Namun, karir tersebut tidak dilanjutkan. Pak Fikri kemudian mengundurkan diri dan memilih bergabung dengan PKS. Pemilu 1999 mengantarnya duduk sebagai anggota

DPRD Kabupaten Tegal.

Banyak yang bilang saat seseorang menjadi politisi maka dunia berubah, tetapi sosok Pak Fikri tetap apa adanya. Tekun dan telaten mengawal komisi pendidikan, hingga diamanahkan menjadi Wakil Ketua Komisi X. Bapak dari 7 anak, yang terdiri dari 5 putra dan 2 putri ini menjadi tokoh panutan bukan hanya di panggung parlemen, tetapi juga di tengah-tengah keluarga. Sesibuk apapun, senantiasa membangun komunikasi dengan keluarga. Baginya, keluarga adalah pranata awal yang paling penting dalam struktur sosial. Karenanya penting regulasi yang memberi ketahanan kepada keluarga.

Pesan Pak Fikri untuk keluarga Indonesia "Keteladanan adalah pilar utama ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah pilar ketahanan bangsa."

### SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM dapat mengikuti social media:

Facebook : Fikri Faqih  
Twitter : @FikriFaqih  
Instagram : @afikrifaqih



”

Keteladanan adalah pilar utama ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah pilar ketahanan bangsa





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI